



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
(BASARNAS), DAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke – 17
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Senin, 13 Juli 2020
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.00 WIB s.d 16.05 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: Membahas tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I dan II Tahun 2019.
Ketua Rapat	: H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE,.M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: Fisik 17 Orang dan Virtual 17 Orang (34 Orang) dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan Kepala Bapel-BPWS beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 13.05 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Plt. Kepala Bapel-BPWS pada hari ini adalah membahas tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I dan II Tahun 2019.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Kepala BMKG, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dan Kepala Bapel-BPWS untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel-BPWS yang meraih predikat opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) pada Hapsem I dan II BPK tahun 2019. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel-BPWS untuk dapat mempertahankan predikat WTP tersebut di masa mendatang.
2. Komisi V DPR RI meminta kepada BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel-BPWS untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah preventif yang harus dilaksanakan agar temuan-temuan dalam Hapsem I dan II BPK Tahun 2019 tidak terulang lagi di tahun-tahun mendatang, sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.
3. Terkait dengan temuan yang berulang, Komisi V DPR RI meminta BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel-BPWS untuk meningkatkan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya secara lebih ketat dan detail untuk menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel dan efektif dalam pemanfaatan keuangan negara.
4. Berdasarkan hasil temuan BPK, Komisi V DPR RI berpendapat bahwa dalam rangka pembangunan infrastruktur untuk kepentingan kegiatan mitigasi dari BMKG pada pelaksanaannya di atas lahan/tanah pemerintah (K/L dan BUMN), agar menjadi prioritas penyelesaian atas aset tersebut yang administrasinya dapat dilakukan kemudian.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.05 WIB.

Jakarta, 13 Juli 2020

KETUA RAPAT,



ANDI IWAN DARMAWAN ARAS

KEPALA BMKG,



DWIKORITA KARNAWATI

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,



BAGUS PURUHITO

PLT. KEPALA BP-BPWS,



ACHMAD HERRY MARZUKI